

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amnesti Internasional yang merupakan sebuah organisasi hak asasi manusia (HAM) yang sifatnya non-pemerintahan serta non-keuntungan yang beroperasi dalam skala internasional, melakukan berbagai upaya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Mesir di bawah pimpinan Abdul Fattah As-Sisi. Menurut laporan yang dilakukan oleh Amnesti Internasional, Mesir masih menjadi negara yang tergolong tinggi dalam kasus pelanggaran HAM.¹ Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Mesir yakni kasus membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, penahanan sewenang-wenang dan adanya persidangan yang tidak adil, banyaknya kasus penghilangan paksa yang disertai penyiksaan dan perlakuan buruk, banyak sekali penjatuhan hukuman mati, eksekusi dan pembunuhan di luar kendali hukum, diskriminasi seksual dan gender yang disertai kekerasan, dan lain-lain. Amnesti Internasional sendiri sudah melakukan kontak dengan pemerintah Mesir untuk bisa menjalankan kebijakan dan peraturan dengan memperhatikan penghormatan terhadap HAM. Amnesti Internasional yang merupakan bagian dari *Transnational Advocacy Network* memanfaatkan jaringan kerja sama baik dengan individu maupun kelompok tersebut untuk memberikan

¹ Amnesty International, *Laporan Amnesty International 2020/21*, 2020, 1–25, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/egypt/>.

tekanan diplomatis terhadap pemerintah Mesir. Amnesty Internasional juga berharap agar hukum dan HAM bisa dilakukan dengan adil dan layak yang mana pada awal pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi sendiri banyak sekali terjadi kasus penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan bahkan penindasan terhadap kebebasan berpendapat, dan juga pembungkaman terhadap oposisi politik. Pelanggaran HAM yang dilakukan biasanya ditujukan kepada aktivis maupun demonstran yang bertentangan atau melawan dengan jalannya pemerintahan. Jalur pelanggaran HAM yang dilakukan biasanya berupa penghilangan paksa dan penangkapan yang diadili tanpa proses hukum. Hingga saat ini di tahun 2023 pelanggaran HAM yang terjadi tetap berlanjut di bawah kepemimpinan As-Sisi berdasarkan laporan terakhir Amnesty Internasional.²

Sejarah didirikannya Amnesty Internasional sebagai organisasi yang bersifat non-pemerintahan untuk melakukan aksi pembelaan terkait dengan kegiatan perlindungan juga penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia yang diprakarsai oleh seorang pengacara asal Inggris yakni Peter Benenson. AI sendiri dibentuk pada tahun 1961 dengan tujuan membela sekaligus membebaskan tahanan politik yang ditangkap sewenang-wenang dengan melakukan aksi kampanye. Tujuan utama dari organisasi ini sudah jelas untuk melakukan perlawanan terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi seperti melakukan

² Amnesty International, *EGYPT 2022*, 2022, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/egypt/>.

perlawanan terhadap tindakan diskriminasi, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya.³

Negara Mesir atau biasanya disebut juga dengan Republik Arab Mesir merupakan negara yang secara geografi dan kependudukan terletak diantara persimpangan dua benua yaitu, Afrika dan Asia lebih tepatnya terletak di Afrika Utara dan Asia Barat. Negara ini memiliki interaksi bersejarah dengan semua wilayah tetangganya. Negara ini memiliki kebudayaan yang kaya dan sejarah mesir kuno yang terkenal, selain itu sejarah kompleks terkait dunia politik Mesir juga sangat mewarnai perjalanan sejarah negara ini.⁴ Mesir juga dapat dikonseptualisasikan sebagai oasis linier di Sahara Timur, yang melintasi beberapa wilayah Afrika. Negara Mesir dapat menjadi stasiun jalan atau berfungsi sebagai refugium, serta menjadi tempat pemukiman dengan strategi adaptif biologis dan budayanya sendiri. Persimpangan jalan dan oasis/refugium dari kedua perspektif ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang proses-proses yang dapat mempengaruhi populasi/masyarakat Lembah Nil.⁵ Dari sudut pandang ini, presentasi ini akan memeriksa aspek-aspek yang mungkin disebut sebagai genetika sejarah Lembah Nil di dalamnya terdapat berbagai tingkat sejarah biokultural. Hal menarik di sini adalah pola variasi utara-selatan di Lembah Nil Mesir. Meskipun letak wilayah Negara Mesir ini sangat strategis di

³ Lama Abu Odeh, *The Supreme Constitutional Court of Egypt: The Limits of Liberal Political Science and CLS Analysis of Law Elsewhere*, American Journal of Comparative Law 59, no. 4 (2011): 985–1007, <https://doi.org/10.5131/AJCL.2011.0014>.

⁴ S.O.Y. Keita and A.J. Boyce, *Genetics, Egypt, and History: Interpreting Geographical Patterns of Y Chromosome Variation*, History in Africa 32 (2005): 221–46, <https://doi.org/10.1353/hia.2005.0013>.

⁵ Umma Farida, *Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir*, Jurnal Penelitian 8, no. 1 (2014): 45–70.

Benua Afrika akan tetapi negara ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan internal yaitu kekerasan, pelecehan, dan genosida. Awal penyebabnya terjadi konflik di Negara Mesir yakni Revolusi Arab Spring pada tanggal 25 Januari 2011. Revolusi ini sudah terjadi sejak 2010 sampai 2011 dengan adanya pergolakan politik yang berupa aksi protes massa yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal sebagai *The Arab Spring*. Husni Mubarak yang merupakan penguasa diktator telah berhasil dilengserkan (melakukan pengunduran diri) melalui adanya revolusi yang terjadi pada tahun 2011 tersebut, hal ini menjadi kebangkitan demokrasi di Mesir.⁶

Setelah lengsernya Husni Mubarak, Muhammad Mursi yang merupakan seorang akademisi di salah satu universitas sekaligus tokoh politik dari Partai Kebebasan dan Keadilan (Sayap Kanan Ikhwanul Musilimin) terpilih menjadi Presiden Mesir pada Juni 2012. Mursi dipilih secara langsung oleh masyarakat Mesir melalui pemilihan umum yang dilakukan, hal ini menjadikan Mursi sebagai presiden pertama yang dipilih secara jujur dan adil oleh masyarakat karena pada praktek pemilu sebelumnya (terpilihnya Husni Mubarak) banyak terjadi kecurangan yang dilakukan dalam penghitungan suara pada saat itu. Mohammad Mursi yang baru saja menjabat setelah transisi politik dari adanya revolusi, dihadapkan dengan situasi atau kondisi Mesir yang kompleks.⁷ Terlebih lagi dalam menjalankan stabilitas negaranya, Mursi dihadapkan dengan Front

⁶ Said Hafif Anshori, *Pergolakan Politik Di Mesir (2011-2014 M)*, 2019, 95, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36648/>.

⁷ Fikri Zulfikar, *DEMOKRATISASI DAN POLITIK TRANSISI DI INDONESIA DAN MESIR: Studi Perbandingan Jatuhnya Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) Dan Muhammad Mursi (2012-2013)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41060>.

Keselamatan Nasional (NSF) yakni koalisi oposisi yang selalu menentang terhadap kebijakan yang dibuat oleh Mursi. Hal ini menyebabkan implementasi dari kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Kebijakan yang dibuat oleh Muhammad Mursi juga penuh dengan kontroversi karena dianggap menguntungkan kelompok Islamis terutama ikhwanul muslimin yang merupakan golongan pendukung Mursi. Keberadaan dari koalisi oposisi tadi mendukung sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Mesir, karena kebijakan yang dibuat Mursi malah semakin memperburuk sektor ekonomi, konstitusi dan lain-lain.⁸

Aksi protes dan unjuk rasa yang dipimpin oleh NSF berujung pada penggulingan Muhammad Mursi sebagai presiden. Kudeta Militer tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Militer Angkatan Bersenjata Mesir sekaligus Menteri Pertahanan yakni Abdul Fattah As-Sisi. Aksi kudeta militer tersebut terjadi pada tahun 2013 dan menyebabkan banyak sekali pelanggaran HAM pasca terjadinya kudeta militer tersebut.⁹ Pada 8 Juni 2014, As-Sisi resmi dilantik menjadi presiden baru Mesir. Pada awal pemerintahannya, As-Sisi menerapkan beberapa kebijakan untuk membungkam oposisi politiknya. Kebijakan yang dibuat juga telah membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan pelanggaran HAM lainnya. Pada saat Rezim Abdul Fattah As-Sisi juga banyak sekali penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dengan hukuman tanpa

⁸ A Pontoh, *Studi Institusionalisme: Analisis Kejatuhan Pemerintahan Muhammad Mursi Di Mesir Pada Tahun 2013*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42835>.

⁹ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, *Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir*, Unisia 35, no. 78 (2013): 71–79, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol35.iss78.art7>.

proses pengadilan. Pelanggaran HAM ini cenderung terjadi pada pihak-pihak yang masih belum menerima dilengserkannya Muhammad Mursi. Golongan tersebut biasanya dari ikhwanul muslimin dan juga entitas kelompok Islamis. Selain itu juga terdapat tokoh liberal, sekuler dan aktivis yang pro-demokrasi pada pemerintahan Mursi.¹⁰

Penangkapan terhadap mahasiswa, aktivis, jurnalis dan juga para demonstran yang tidak sejalan dengan pemerintahan As-Sisi turut menjadi korban. Hal ini karena kebijakan yang As-Sisi buat yakni kebijakan *protest of law* yang memperbolehkan aparat keamanan menangkap, menahan hingga sejumlah aksi berlebih yakni penembakan dilakukan kepada para demonstrasi.¹¹ Kebijakan terkait terorisme juga turut diberlakukan yang mana setiap individu, kelompok atau entitas akan dimasukkan ke dalam daftar terorisme apabila tidak sejalan dengan pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi. Dari diberlakukannya sejumlah kebijakan seperti di atas, tercatat terdapat 1176 kasus penghilangan paksa oleh Pemerintah Mesir pada periode 2013 sampai dengan 2017 berdasarkan laporan dari Amnesty Internasional.¹² Untuk periode 2017 hingga 2023 yang merupakan tahun terakhir laporan dari Amnesty Internasional, pelanggaran HAM berupa membatasi kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, penahanan sewenang-wenang dan adanya persidangan yang tidak adil, banyaknya kasus

¹⁰ Samir, *Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING*, Jurnal Penelitian Politik 18, no. 2 (2021): 159–71, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.

¹¹ Rizki Ananda, *Analisis Faktor Kepemimpinan Terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance Di Mesir Oleh Rezim Abdel Fattah Al-Sisi*, Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents* 5 (2019): 929–37, 22694-45942-1-SM (1).pdf.

¹² Amnesty International, *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022, 2023*, 1–25, <https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/05/Amnesty-Hukuman-Mati-dan-Eksekusi-2021-4.pdf>.

penghilangan paksa yang disertai penyiksaan dan perlakuan buruk, banyak sekali penjatuhan hukuman mati, eksekusi dan pembunuhan di luar kendali hukum, diskriminasi seksual dan gender yang disertai kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya masih terus terjadi dan ini merupakan kegagalan pemerintah selama Abdul Fattah As-Sisi menjabat.

Hak asasi manusia (HAM) bisa dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat secara alami dan inheren pada setiap individu dan diakui sebagai prinsip dasar bahwa hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan prinsip etika universal tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status social bahkan asal-usul. HAM mencakup hak hidup dan mendapatkan prosedur hukum yang adil apabila hendak dijatuhkan eksekusi mati, hak kebebasan dan keamanan pribadi untuk tidak dianiaya atau ditahan secara sewenang-wenang, hak kebebasan berpendapat untuk berekspresi dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut represi, dan beberapa hak lainnya untuk kelayakan hidup.¹³

Upaya dan tindakan keras perlu segera dilakukan oleh pemerintah Mesir guna mewujudkan keadilan tentang kejelasan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca kudeta militer yang berlanjut pada banyaknya aksi demonstrasi oleh masyarakat serta penahanan dan penghilangan secara paksa pada berbagai aktivis, media, maupun demonstran yang bertentangan dengan pemerintah. Sejumlah aksi militer yang juga menembaki, menyiksa, menahan demonstran dalam gelombang demo untuk meredam aksi tersebut. Amnesty International menginginkan kejelasan terkait bagaimana Pemerintah Mesir

¹³ Peter Evans, *Symposium on Development as Freedom by Amartya Sen Collective Capabilities, Culture, and Amartya Sen's Development as Freedom*, *Studies in Comparative International Development* 37, no. 2 (2002): 54–60.

memberikan kompensasi kepada para korban, menegakkan keadilan dan menghukum para pelaku penembakan.¹⁴ Laporan dari Amnesty Internasional yang memberikan gambaran ataupun dokumentasi bagaimana grafik pelanggaran HAM terjadi di Mesir pada periode 2013 pasca kudeta, yang dilanjutkan dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM pada tahun 2014 hingga 2023 yang merupakan masa pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi untuk membungkam media kritik dan massa serta banyaknya penyelewengan terhadap hak masyarakat Mesir. Namun laporan dan tuntutan dari Amnesty Internasional selalu mengalami penolakan oleh pemerintah Mesir dan merespons bahwa apa yang dilakukan demi kedaulatan negara karena dinilai ancaman.¹⁵ Sementara untuk tindakan pelanggaran HAM lainnya mereka selalu beralih tentang hal lain untuk selalu menutupi pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah “Bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Mesir masa pemerintahan Abdul Fattah as-Sisi terhadap masyarakat?”.

¹⁴ Rizki Ananda, *Analisis Faktor Kepemimpinan Terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance Di Mesir Oleh Rezim Abdel Fattah Al-Sisi*. Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents* 5 (2019): 929–37, 22694-45942-1-SM (1).pdf.

¹⁵ Esnoe Faqih, *Amnesty International Tuding Mesir Berupaya Tutupi Pelanggaran HAM*, SINDONEWS.COM, 2022, <https://international.sindonews.com/read/892669/44/amnesty-international-tuding-mesir-berupaya-tutupi-pelanggaran-ham-1663866576?showpage=all>.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka berikut adalah tujuan dari adanya penelitian ini:

1. Untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana pemerintah Mesir melakukan tindakan pelanggaran HAM.
2. Untuk mengeksplorasi dan memahami bentuk atau tindakan pelanggaran HAM apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Mesir.
3. Untuk mempelajari dan memahami bagaiman tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Amnesti International dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Negara Republik Arab Mesir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara akademis dan praktis dalam penelitian ini salah satunya adalah ;

A. Manfaat Akademis

Dalam penulisan penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran pengetahuan tentang perkembangan Ilmu Hubungan International terutama dalam upaya amnesti internasional untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Mesir. Diharapkan juga kedepannya nanti, di dalam hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitiannya.

A. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dalam segi praktis, penulis dapat mengembangkan ilmu yang didapat dari penelitian ini dalam menggali informasi lebih dalam terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Mesir untuk kemudian diharapkan mampu bermanfaat terhadap perkembangan dan pemikiran dalam studi Ilmu Hubungan International terkait upaya Amnesti Internasional dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Mesir.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam rangka untuk membantu penulis dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi dari beberapa perspektif dan juga untuk menambah pengetahuan penulis dalam mengkaji suatu permasalahan, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu terkait dengan kajian atau penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi untuk bisa menyelesaikan penelitian tentang peran Amnesti Internasional dalam penanganan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Mesir pada masa Abdul Fattah As-Sisi.

Penelitian pertama merupakan penelitian berjudul **“Upaya Amnesti International Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Imigran Haiti Beserta Keturunannya Di Republik Dominika”** yang dilakukan oleh Nur Irvan Afandi. Di dalam Penelitian tersebut, terdapat konflik dengan ketegangan dan sejarah panjang yang melibatkan Republik Dominika dengan imigran Haiti tentang permasalahan HAM. Tindakan diskriminasi, adanya perlakuan ketidaksetaraan, dan juga pelanggaran HAM oleh Pemerintah Republik Dominika terhadap imigran Haiti. Amnesti Internasional yang menyoroti hal tersebut,

bekerja sama dengan *Human Rights Watch* aktif untuk menyuarakan keprihatinannya pada khalayak internasional, Amnesty Internasional juga aktif melakukan advokasi terhadap penegakan HAM dan mengawasi situasi di lapangan. Tak hanya itu, dalam penelitian tersebut juga AI berusaha untuk Menyusun serta mendokumentasikan pelanggaran apa saja yang terjadi terhadap imigran Haiti sebagai bukti penguat argumentasi mereka di khalayak internasional. AI juga memastikan adanya perlindungan terhadap para imigran Haiti dengan melakukan serangkaian aksi kampanye dan lobi politik untuk mendesak pihak Republik Dominika dalam memenuhi standar HAM dengan layak.¹⁶

Selanjutnya penelitian Kedua yang disusun oleh Nanda Aulia Dina dengan judul **“Upaya Malala Fund Dalam Mengatasi Masalah Pendidikan Anak-Anak Perempuan Pengungsi Suriah Di Lebanon”**. Di dalam penelitian yang masih berkaitan dengan pasca revolusi *Arab Spring* yang terjadi pada tahun 2011, yang mana pada saat itu terjadi konflik di Suriah yang mengharuskan sejumlah besar keluarga mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon. Malala Fund yang dihadapkan dengan masalah pendidikan yang menimpa anak-anak khususnya perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan berupaya melakukan sejumlah aksi penggalangan dana, bekerja sama dengan beberapa mitra yang bersifat lokal maupun internasional, dan mencoba melakukan aksi advokasi untuk melakukan perubahan kebijakan inklusif terhadap anak perempuan pengungsi Suriah yang mengungsi di Lebanon. Malala Fund berusaha untuk memastikan dan

¹⁶ S BAHYAH, *Peran Masyarakat Diaspora Haiti Di Amerika Serikat Dalam Rekonstruksi Haiti Pasca Gempa 2010 Melalui Jaringan Internet*, 2012, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15447>.

berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang baik untuk anak-anak perempuan pengungsi Suriah serta mendorong masyarakat, organisasi lain, dan juga pemerintah setempat untuk bisa bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁷

Penelitian Ketiga di susun oleh Laka Dzimar dengan judul “**Upaya Amnesti International dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Di Tibet**”. Di dalam Penelitiannya, Peran Amnesti International dalam menyelesaikan kasus HAM di negara Tibet ingin menghentikan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Tibet dan Pemerintah Tiongkok yang melibatkan pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan untuk beragama, aksi penindasan politik, serta pelanggaran kegiatan budaya. Amnesti Internasional yang memang berfokus menyelesaikan permasalahan seperti ini melakukan aksi protes dan mencoba mengungkap kebenaran yang terjadi dengan melakukan penyelidikan yang bekerja sama dengan organisasi lokal yang bersedia mendukung serangkaian aksi advokasi serta melakukan laporan. Amnesti Internasional juga berupaya untuk mendokumentasikan aksi penangkapan sewenang-wenang, pelanggaran hak untuk memilih agama dan menjalankan ibadah dalam beragama yang terjadi pada wilayah tersebut. AI juga melakukan lobi politik kepada Pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan akses lebih untuk melakukan pemantauan terhadap pelanggaran HAM di Tibet. Amnesti

¹⁷ Ramaditya Anugrah Pratama, *Primordialisme Dalam Hubungan Transnasional: Peran Identitas Dalam Mendorong Arus Pengungsi Suriah Ke Lebanon, 2011-2014*, *Journal of International Relations* 2, no. 3 (2016): 84–95, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Internasional menginginkan perubahan positif terjadi dan mampu mengakhiri pelanggaran HAM di Tibet.¹⁸

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Transnational Advocacy Network (TAN)

Dalam buku yang berjudul “*Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*”, karangan Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink yang membahas tentang Teori *Transnational Advocacy Network* sebagai penggambaran bagaimana perubahan kebijakan global bisa dipengaruhi oleh aktor transnasional dan organisasi non-pemerintahan (NGO).¹⁹

Transnational Advocacy Network merupakan kerja sama untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan global yang melibatkan jaringan kolaboratif aktor-aktor non pemerintahan seperti NGO, kelompok masyarakat sipil, aktivis, yayasan, gerakan sosial lokal dan lain sebagainya. Aktor-aktor ini masuk dalam lapisan “protagonis” yaitu golongan individu maupun organisasi yang memulai aksi advokasi atau pembelaan untuk melawan “*opponents*” dalam melakukan perubahan kebijakan yang diinginkan.

TAN sendiri memiliki strategi komunikasi dalam melakukan aksi mobilisasi untuk mendapatkan dukungan dan mengubah pandangan masyarakat serta mengubah kebijakan dalam memperjuangkan hal yang diinginkan. Strategi ini pun bisa berupa konferensi, aksi kampanye, melalui media, lobi pemerintahan

¹⁸ Nuzlah Zanjabela, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Xinjiang, China Periode 2019-2020*, 2021.

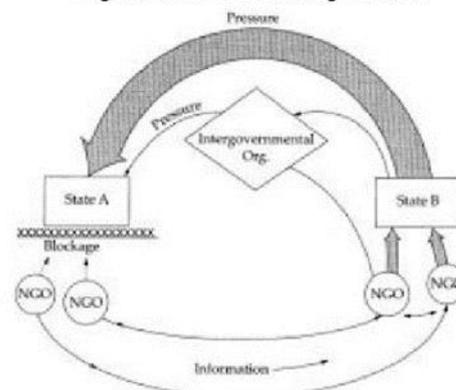
¹⁹ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, *Globalization: Causes and Effects*, 2017, 221–33.

dan lembaga nasional maupun internasional, penggunaan bukti empiris, dan jaringan hubungan yang kuat.

Menurut Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink terdapat 3 jalur utama yang mempengaruhi perubahan kebijakan, yakni; 1) Jalur kognitif merupakan jalur untuk mengubah kebijakan terhadap suatu isu tertentu dengan memobilisasi persepsi dan pemahaman masyarakat; 2) Jalur normatif adalah penekanan dan pembetulan norma yang dilakukan oleh TAN dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan juga HAM; 3) Jalur regulatif adalah pembuatan hukum dan perjanjian internasional yang bisa dipengaruhi oleh TAN.

Selanjutnya, Margareth dan Kathryn juga menjabarkan tentang konsep “*Boomerang Pattern*” yang dipahami apabila pemerintah domestik tidak mampu dipengaruhi oleh sekelompok advokasi, maka kelompok advokasi ini bisa mencari dukungan melalui jaringan *Transnational Advocacy Network* yang bersifat internasional untuk kemudian membantu menekan pemerintah domestik mereka.

Figure 9.1: Boomerang Pattern



Source: Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, Ithaca: Cornell University Press, 1998, p.13

Gambar 1. 1 Boomerang Pattern

Mempromosikan HAM, mengatasi isu-isu global, dan mempengaruhi kebijakan internasional menjadi kekuatan penting bagaimana kemudian Teori *Transnational Advocacy Network* memandang jaringan aktor non-pemerintah ini. TAN juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mengkoordinasi pembentukan opini publik untuk memobilisasi dukungan lintas batas.²⁰

1.5.2. Non-Governmental Organization (NGO)

Non-Governmental Organization (NGO) merupakan organisasi yang tujuan utamanya adalah memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan maupun masyarakat yang mana organisasi ini merupakan organisasi independen dari pemerintah. Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dan fungsi dari NGO sebagai berikut:²¹

- a) Pluralisme Sosial: Dalam teori ini berpandangan, NGO membantu menyuarakan kepentingan berbagai kelompok dalam menciptakan keragaman dan pluralitas dalam masyarakat serta mempromosikan partisipasi masyarakat.
- b) Partisipasi Demokratis: Teori ini berkeyakinan bahwa NGO bisa menciptakan ruang untuk suara masyarakat sipil dalam mendukung proses demokratisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
- c) Advokasi dan Pengawasan: Teori ini menyatakan bahwa NGO juga biasanya berperan sebagai advokat atau pembela terhadap hak asasi

²⁰ Keck and Sikkink.

²¹ Bruce Britton, *The Learning NGO*, International NGO Training and Research Centre, no. July (1998).

manusia dan menjadi pengawas terhadap pemerintah maupun institusi lain. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memastikan norma-norma etika dan hukum dapat dipatuhi.

- d) Pemberdayaan Masyarakat: NGO berperan untuk meningkatkan kondisi taraf hidup masyarakat yang perlu diberdayakan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan juga sumber daya yang dibutuhkan.
- e) Teori Kemitraan: Dalam konsep ini NGO menjadi penghubung terhadap berbagai sector untuk mencapai tujuan yakni pembangunan berkelanjutan yang biasanya dilakukan dengan kemitraan antara pemerintah, sector swasta dan juga NGO.

Menurut Hans Peter Schmitz dalam bukunya yang berjudul “*NGOs and the Globalization of Managerialism: A Research Framework*” tahun 2005 yang membahas tentang manajerialisme dan perubahan tatanan global bisa dipengaruhi oleh NGO. Schmitz memiliki pandangan bahwa NGO bisa memberikan tuntutan akuntabilitas, efisiensi, dan juga profesionalisme dengan menyoroti adanya tekanan agar dapat beroperasi dengan lebih efektif dan bisa memenuhi tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan kapasitas manajerial NGO. Namun penting diingat bahwa pandangan Schmitz ini bersifat kritis dan mungkin mencakup satu aspek saja dari banyaknya pandangan atau perpektif terhadap NGO.²²

²² Schmitz Peter, *NGOs and the Globalization of Managerialism: A Research Framework*, 2005, 0–5.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menjelaskan fenomena atau kejadian yang sudah terjadi dengan hasil penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian deskriptif ini berfokus untuk bisa mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan persoalan dan pernyataan terkait upaya organisasi internasional pegiat HAM yakni Amnesty International untuk menangani kasus HAM yang terjadi di Mesir.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini menggunakan teknik yang bersifat kualitatif yakni dengan penulisan yang berbentuk dari pencarian sumber literatur seperti jurnal, buku, media online, atau media cetak serta sumber data-data lainnya yang dapat dikembangkan untuk dapat menjelaskan suatu hal yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Berdasarkan pada itulah sebuah data penelitian ini dapat dicocokkan berulang kali pada penelitian lain sehingga kedepannya dapat menyimpulkan bahwa apa yang penulis paparkan benar dan tidak ada yang salah.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan sebuah teknik kualitatif dengan menggunakan literatur review seperti jurnal, buku, laporan ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagian lainnya yang tentunya masih bersangkutan dengan topik pembahasan pada penulisan penelitian.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar mempermudah pengerjaan penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi jangkauan pada penulisan dalam ruang lingkup kajiannya agar tidak menyimpang pada tema dan tujuan yang ingin dijelaskan. Fokus utama dari penulisan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui peran organisasi Amnesty International dalam menangani masalah HAM di Mesir dari tahun 2014-2023 yang merupakan tahun pasca terjadinya kudeta militer yang menyebabkan banyak pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai ditambah lagi dengan banyaknya kasus *enforced disappearance*, penahanan sewenang-wenang tanpa proses peradilan, penjatuhan hukuman mati yang menuai kontroversi, dan masalah HAM lainnya pada masa pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi.

1.7 Hipotesa

Amnesti Internasional yang merupakan organisasi non pemerintah sekaligus sebagai bagian *Transnational Advocacy Network* dalam penanganan pelanggaran HAM di Mesir pada pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi dapat menjadi instrument efektif. Pertama, Amnesti Internasional bisa memberikan tekanan global kepada pelanggar HAM dengan metode kinerja yang mereka miliki dan berkat jaringan internasional untuk memastikan akuntabilitas. Amnesti Internasional bisa mendorong keprihatinan global untuk mengecam tindakan pelanggaran HAM. Kedua, Amnesti Internasional bisa memperjuangkan tahanan politik dan restorasi terhadap HAM yang telah dicabut oleh pemerintah. Hal ini bisa memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban dari ketidakadilan pemerintah Mesir. Dalam menciptakan dialog konstruktif antara

pemerintah Mesir dengan komunitas internasional untuk kemudian mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bisa dimainkan oleh Amnesti Internasional dalam menangani pelanggaran HAM. Oleh karena itu, bukan hanya bentuk kritik yang diberikan akan tetapi bisa memberikan perubahan yang lebih positif dalam menangani pelanggaran HAM.

1.8 Sistematika Penulisan

<p>BAB I</p> <p>Pendahuluan</p>	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Konseptual</p> <p> 1.5.1 Transnational Advocacy Netwrok (TAN)</p> <p> 1.5.2 Non-Governmental Organization (NGO)</p> <p>1.6 Metode penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data</p> <p> 1.6.3 Teknik Analisa Data</p> <p> 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.7 Hipotesa</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>PELANGGARAN HAM DI MESIR</p>	<p>2.1 Profil Umum Negara Mesir</p> <p>2.2 Pengertian HAM dan Pelanggaran HAM</p>

ERA KEPEMIMPINAN AS-SISI	2.3 Bentuk Pelanggaran HAM di Mesir Pada Era As-Sisi
BAB III AMNESTI INTERNASIONAL SEBAGAI TRANSNATIONAL ADCOY NETWORK DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM DI MESIR	3.1 Profil Amnesti Internasional 3.2 Amnesti Internasional sebagai Transnational Advocacy Network 3.3 Upaya Amnesti Internasional dalam Penanganan Pelanggaran HAM di Mesir 3.3.1 Melakukan Pemantauan, Investigasi, dan Pelaporan Untuk Mencari Bukti Pelanggaran HAM di Mesir 3.3.2 Melakukan Aksi Kampanye Publik Sebagai Seruan Protes Terhadap Pemerintah Mesir 3.3.3 Memberikan Bantuan serta Perlindungan Kepada Para Pembela HAM dan Korban Pelanggaran HAM 3.3.4 Melakukan Advokasi Diplomatik dan Tuntutan Kebijakan 3.4 Amnesti Internasional dalam Menjalankan Fungsi Advokasi dan Pengawasan
BAB IV PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran